

LKIP  
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)

# BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

[www.bkpp.baritokualakab.go.id](http://www.bkpp.baritokualakab.go.id)

— BKPP  
KAB. BARITO KUALA

LKIP 2021

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Laporan Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban seperti diamanatkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

BKPP Kabupaten Barito Kuala telah menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi dari Rencana Kerja Tahun 2021 yang juga masa pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Strategis BKPP Tahun 2017-2022 memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

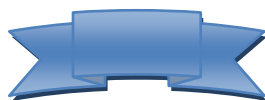
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan memuat persepektif keberhasilan dan kegagalan yang akan menjadi tantangan bagi BKPP Kabupaten Barito Kuala melalui peningkatan kinerja yang lebih baik, fokus dan terarah.

Penyusunan laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam menilai kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance.

Marabahan, 18 Februari 2022

  
KABUPATEN BARITO KUALA  
BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,  
Dr. H. AKI IMAD MAWARNI, M.Pd  
NIP. 19640601 198406 1 001



## RINGKASAN EKSKUTIF

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan capaian ke dua Indikator Kinerja Utama belum mencapai target, dengan rincian :

- a) Persentase PNS yang memenuhi kompetensi 93,10 %
- b) Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian 95,00 dengan nilai SANGAT BAIK karena angka indek **95,00** berada pada interval konversi >95.

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dibidang Kepegawaian. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel A**

**Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang kompeten	1	93,10 %	-	0%	0	0%	1	93,10
2	Meningkatnya Pelayanan Apartur Yang Berkualitas	1	95	-	Indek	1	100	-	-

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	5
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Indikator Kinerja 2021	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>11</b>
3.1. Capaian Kinerja	11
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15
3.3. Analisis Capaian Kinerja	16
3.4. Akuntabilitas Keuangan	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>48</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPP Kabupaten Barito Kuala	4
----------	--	---

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator .....	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama .....	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja .....	9
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian kinerja .....	11
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang tidak tercapai .....	12
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel 3.1.2	Capaian IKU berdasarkan presentase .....	13
Tabel 3.1.3	Capaian IKU berdasarkan kategori .....	13
Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	14
Tabel 3.1.5	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 .....	14
Tabel 3.1.6	Pencapaian Target Sasaran Strategis .....	15
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Tahun 2021 .....	16
Tabel 3.2.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKU I Tahun 2021 .....	17
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu .....	18
Tabel 3.2.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	18
Tabel 3.2.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 .....	20
Tabel 3.2.6	Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2020 .....	22
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu .....	23
Tabel 3.2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja .....	23
Tabel 3.2.9	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra .....	24
Tabel 3.2.10	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja 2 .....	38
Tabel 3.2.11	Komposisi Belanja BKPP .....	39
Tabel 3.2.12	Pagu dan Realisasi Anggaran .....	39
Tabel 3.2.13	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran .....	40
Tabel 3.2.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	47

# Bab I Pendahuluan

## I.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala sebagai lembaga teknis daerah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja menuju kearah yang lebih baik.

Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintahan Kabupaten Barito Kuala.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 pasal 25 Menyatakan bahwa Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas “membantu Bupati menyelenggarakan Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka pada pasal 25 ayat (1) dimaksud Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang diklat, pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kembali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 16

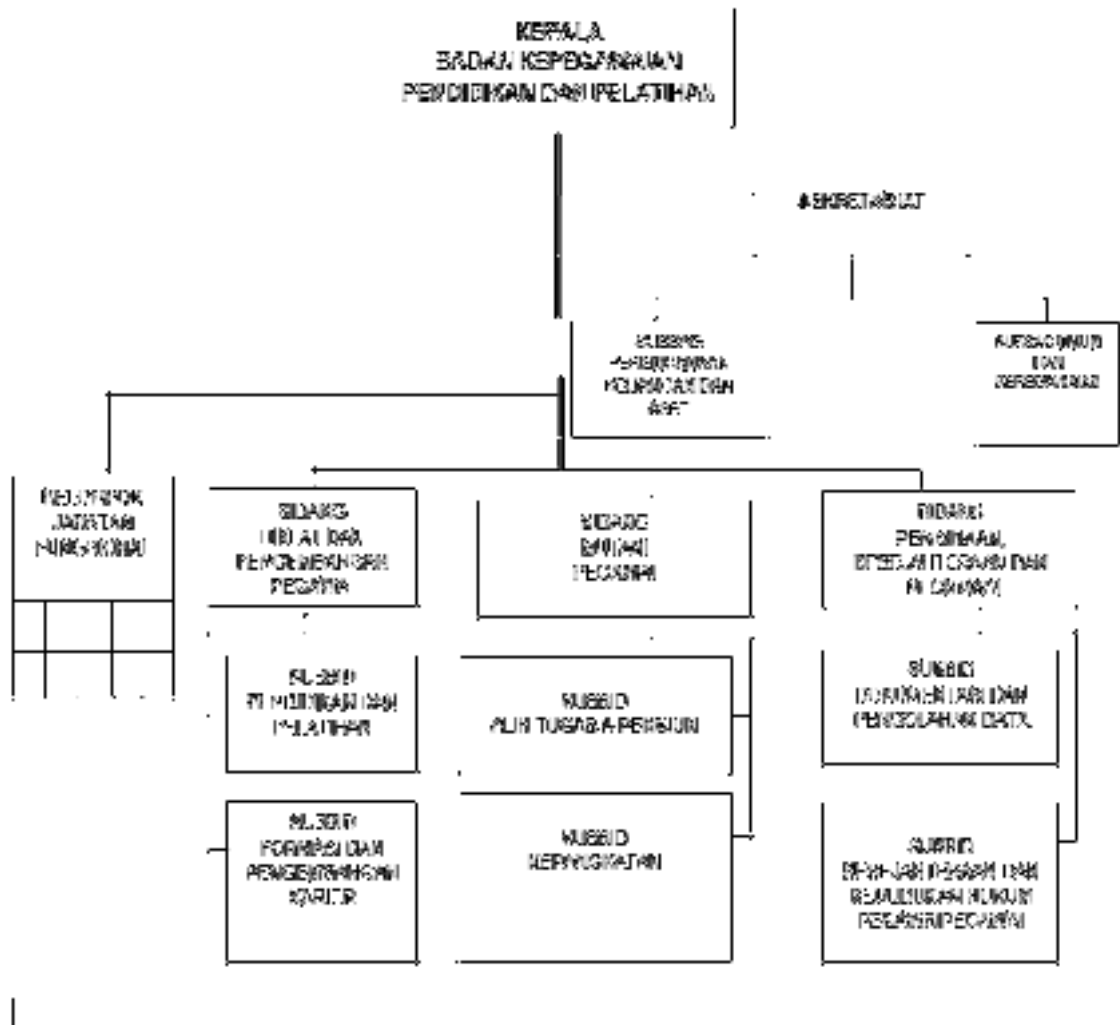
tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17). Dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan- Badan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala secara **Struktural Organisasi** terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  - Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Diklat Dan Pengembangan Pegawai dibantu oleh :  
Sub Kordinator Pendidikan dan Pelatihan
4. Kepala Bidang Mutasi Pegawai yang dibantu oleh:
  - Sub kordinator Alih Tugas dan Pensiun;
  - Sub kordinator Kepangkatan.
5. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian, yang dibantu oleh :
  - Sub kordinator Pengolahan Data;
  - Sub kordinator Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan struktur organisasi dapat terlihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019, tanggal 16 September 2019.



### **I.3 Isu Strategis**

Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada juga sesuai kebutuhan. Komposisi pegawai dalam golongan ruang, pendidikan, dan usia menjadi persoalan dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.

Berbagai prasyarat yang berorientasi pada manajemen kepegawaian saat ini seperti analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan standar kompetensi jabatan masih pembenahan ke arah yang lebih baik sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut ini dapat disampaikan beberapa hal yang terkait dengan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi adalah :

1. Belum sepenuhnya PNS sesuai kompetensi ;
2. Belum terlaksananya sistem remunerasi PNS berbasis kinerja ;
3. Rendahnya pemahaman pejabat kepegawaian menyangkut tupoksinya.

### **I.4 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kurun waktu tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018, tentang Pedoman Umum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

## **I. 5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Insyansi Pemerintah (LKIP)**

Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, Isu Strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, landasan hukum pembuatan dokumen LKIP, dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis , Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

# Bab II Perencanaan Kinerja

## 2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan Bupati Barito Kuala Nomor 256 Tanggal 4 Juni 2018 Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala adalah :

### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten, dengan indikator Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.
2. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas, dengan indikator Persentase Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

### 2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BKPP adalah :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten
2. Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas

Secara lebih rinci tujuan, Indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi	Persentase PNS yang Memenuhi Kompetensi
		Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian

### 2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 dapat di lihat dalam table sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Indikator Kerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	Jumlah PNS yang kompeten dibagi total PNS SeKab Batola kali 100
2.	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang

## 2.1.4 Perjanjian Kinerja 2021

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021, bisa dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja (PK)**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Nilai Indek Reformasi Birokrasi	Persentase PNS yang memenuhi Kompetensi	%	96%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	799.108.200,-
		Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	95	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	830.902.140,-

Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito memiliki dua sasaran dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dan Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Indikator kinerja Persentase PNS yang memenuhi kompetensi didukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 799.108.200,00.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 830.902.140,00

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah direviu, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPAP Tahun 2021.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2021, Renja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel .3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	96%	89,38 %	93,10%
2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian	Indeks	95	95	100

Berdasarkan Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis 1 meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi dengan target 96 % dan realisasi 89,38 % dengan capaian 93,10 % (Jumlah PNS yang kompeten/total ASN x 100). Di bandingkan dengan realisasi tahun 2020 indikator persentase PNS yang memenuhi kompetensi target 92 % realisasi 83,30 % dengan capaian 90,54 % terjadi kenaikan sebanyak 2,56 % dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Sasaran strategis 2 meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator Indeks kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 95 dan realisasi 95 dengan capaian 100. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 indikator ke 2 ini dari target 90 realisasi 90,00 dengan capaian 100, terjadi kenaikan sebesar 5 % dari tahun 2020.

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2021**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	-

Berdasarkan Tabel 3.1.2 Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan persentase <100 atau tidak tercapai sebanyak 1 dan tercapai/sesuai target sebanyak 1.

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2021**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Berdasarkan table 3.1.4 indikator yang dinilai sangat baik sebanyak 1 indikator .

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	93,10 %	Tidak tercapai
2	Sasaran Strategis 2	1	100	Sangat baik

Pada tabel di atas diketahui bahwa sasaran strategis 1 pada tahun 2021 tidak tercapai, sedangkan sasaran strategis 2 tahun 2021 dengan predikat sangat baik.

**Tabel 3.1.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	93,10 %				Baik	
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100					Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.2.2, Sasaran Strategis 1 dengan jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 93,10 % dengan predikat baik.

Sasaran Strategis 2 jumlah indikator sebanyak 1 dan rata-rata capaian sasaran 100 dengan predikat Sangat baik.

**Tabel 3.1.6**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	93,10 %	0	0	0	0	1	93,10
2.	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1	100	0	0	1	100	0	0

Dari table diatas bisa dilihat bahwa dari ke 1 indikator sasaran pencapaiannya dibawah target, yaitu Persentase PNS yang memenuhi kompetensi.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Nomor 188.45/19/BKPP/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	1 indikator

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

### 3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### Sasaran Strategis 1. MENINGKATNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG KOMPETEN

Sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang terbuka dan melayani”, Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi pada sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan berbasis Teknologi Informasi”. Untuk upaya pencapaian sasaran ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator “Persentase PNS yang memenuhi kompetensi”.

“Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” dengan formulasi perhitungan :

*Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi dibagi total pegawai se Kabupaten Barito Kuala di x 100.*

Capaian kerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2021.**

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2021 ditargetkan dengan nilai 96 % . Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan nilai realisasi sebesar 90,54 % yang diperoleh dari jumlah total ASN sebanyak 4.556 orang, sedangkan jumlah ASN yang kompeten sebanyak 3.790 ditambah yang telah mengikuti diklat sebanyak 282 orang jadi jumlah keseluruhan sebanyak 4.072 orang maka hasil capaian untuk indikator pertama ini adalah 93,10 % ( $4.072/4.556 \times 100 = 89.38\% / 96\% = 93,10\%$ ), dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai capaian sebesar 83,30 % diperoleh dari jumlah ASN yang kompeten sebanyak 3.812 PNS dibagi 4.576 total ASN x 100 , maka capaian kinerja adalah 90,54% ( $83,30\%/92\% \times 100$ ), dari hasil capaian dapat disimpulkan terdapat kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2,56 %.

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	96 %	89,38%	93,10

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator kinerja utama” Persentase PNS yang memenuhi kompetensi” berdasarkan Renstra 2017-2022, Tahun 2021 ditargetkan dengan nilai 96 % , dengan nilai realisasi sebesar 93,10 % ( $4.072/4.556 \times 100 = 89.38\% / \text{target tahun 2021 } 96\% = 93,10\%$ )

Tahun 2019 ditargetkan dengan nilai 89 % . dengan nilai realisasi sebesar 74,99 % diperoleh dari ( $74,99\%/89\% \times 100 = 84,26\%$ ). Sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 92 % dengan nilai realisasi sebesar 83,30 diperoleh dari ( $83,30\%/92\% \times 100 = 90,54\%$ ), dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	Persen	74,99	84,26	83,30	90,54	89,38	93,10

### 3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Dalam pengukuran capaian kinerja jangka menengah yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam sasaran strategis Renstra tahun 2017-2022.

Caranya adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 terhadap realisasi capaian sampai dengan tahun 2020, capaian realisasi terhadap target Renstra BKPP 2017 -2022 dapat dilihat seperti tabel :

Tabel 3.2.4

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	80	96	89,38	93,10	100	93,10

### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Peningkatan kompetensi aparatur dengan melalui pendidikan dan pelatihan dapat dicapai sebesar 93,10 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 90,54 % jika dibandingkan dari kinerja tahun 2020, kenaikan hanya 2,56 %.

**Pencapaian kinerja dimaksud disebabkan adanya :**

1. Jumlah yang diusulkan lebih terokomodir dari tahun lalu.
2. Adanya Perjanjian Kerjasama antara BPSDM Propinsi Kalimantan Selatan dengan BKPP Kabupaten Barito Kuala :
  - a. Nomor : 893/ /BPSDMD/2021 tanggal Februari 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pelatihan Dasar Calon PNS Kategori) Golongan II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
  - b. Nomor : 893/ /BPSDMD/2021, tanggal Maret 2021, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I dan Angkatan II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 201.

**Kegagalan Capaian Indikator Sasaran 1 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi disebabkan oleh :**

1. Adanya Pandemi Covid 19 yang melanda, sehingga menyebabkan pemanggilan peserta Diklat Kepemimpinan terbatas serta sebagian kegiatan Diklat Kepemimpinan dilakukan secara daring.).
2. Diklat PNS yang diikuti berdasarkan alokasi dana yang tersedia.
3. Terdapat PNS yang tidak memenuhi kreteria.
4. Belum dimilikinya fasilitas diklat.

**Strategi kedepan :**

1. Untuk Tahun yang akan datang agar anggaran untuk diklat dapat dirasionalisasikan.
2. Dana Diklat terpusat pada satu sumber saja yaitu satu pintu di anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
3. Diharapkan semua peserta terpenuhi untuk mengikuti diklat dengan menambah kuota peserta dari pihak penyelenggara diklat.
4. Mengajukan pembangunan gedung diklat di daerah yang sesuai standar agar sebagian diklat dapat dilaksanakan di daerah.

## 6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Tingkat efisiensi kinerja dapat dilihat dari selisih antara persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat seperti tabel :

**Tabel 3.2.5**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	93,10	94,94	1,84 %

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis pertama meningkatnya Sumber daya aparatur yang kompeten dengan indikator kinerja persentase PNS yang memenuhi kompetensi berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 1,84 %.

## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Keberhasilan pencapaian Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Pada Tahun 2021 tidak terlepas dengan adanya Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh menunjang terhadap pencapaian keberhasilan. Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

Capaian indikator Sasaran 1 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi dukung oleh :

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan :

**a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Diklat Prajabatan bagi CPNSD, untuk kinerja selama tahun 2021 adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 173 orang.

**b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah, untuk kinerja selama tahun 2021 adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah sebanyak 81 orang.

**2. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan :**

**a. Pendidikan dan Penjurangan Struktural**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Kompetensi Manajerial (Diklat Perjurangan Struktural), untuk kinerja selama tahun 2021 adalah :

1. Jumlah Pejabat Eselon 2 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II sebanyak 2 orang.
2. Jumlah Pejabat Eselon 2 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III sebanyak 11 orang.
3. Jumlah Pejabat Eselon 4 yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV sebanyak 15 orang.

Sumber Data diperoleh dari Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

**Sasaran Strategis 2.**

**MENINGKATNYA PELAYANAN APARATUR YANG BERKUALITAS**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas**” Upaya pencapaian sasaran ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito

Kuala menetapkan indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian dengan formulasi perhitungan :

*“Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi di kali nilai penimbang”*

Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

Indikator kinerja utama” Persentase kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian” berdasarkan Renstra 2017-2022.

Capaian masing-masing sasaran dengan 1 indikator tersebut pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indek Kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	95	95	100

### 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indek Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada tahun 2021 target 95 realisasi 95 dengan capaian target 100 dibandingkan dengan tahun 2019 target 85 realisasi 85 dengan capaian target 100 sedangkan pada tahun 2020 target 90 realisasi 90 dengan realisasi 100 jadi terdapat kenaikan dari tahun lalu , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks	85	100	90	100	95	100

### 3. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja 2017-2022

Target dan realisasi indicator kinerja utama (IKU) 2021 dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.8

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Utama	Awal Renstra	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	75	95	95	100	100	100

Tabel 3.2.9

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021	Target Renstra	Selisih Capaian	Ket.
			Realisasi	Realisasi	(%)	
1.	Indek kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	Indek	95	95	100	Capaian diperoleh dari realisasi dibagi target renstra

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada :

Hasil Survey Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM) ini adalah dilingkungi SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yang mana Respondennya adalah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian (IKM) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 sampai dengan Desember 2021.

Pengolahan Data Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian di hitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur Pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian terhadap 9 unsur survei IKM.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, dengan melakukan penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan dan pengaduan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran serta.

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan secara tetap setiap 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

#### **A. Data Kuesioner**

Gambaran karakteristik responden Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	150	50
Perempuan	150	50
Jumlah	300	100

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Jumlah PNS	
	N	%
18-25	39	5
26-35	146	33,33
36-45	98	9,3
46-60	17	16,83
Jumlah	300	100

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS (orang)	Persentase (%)
SMA	45	31,33
Diploma III/IV	92	29,33
Sarjana S1/S2	163	39,34
Jumlah	300	100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel untuk Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2021 sebanyak 300 orang responden.

Dari jumlah responden sebanyak 300 orang tersebut, jumlah kuesioner yang telah dikembalikan sebanyak 300 lembar kuisisioner, dan jumlah kuisisioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah sebanyak 300 lembar kuisisioner.

## B. Perhitungan

Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi Nilai. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur, maka :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 9. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Dari kuesioner yang disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah 300 lembar kuisisioner, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 10. Nilai Masing-Masing Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	1203	<b>4,01</b>	0,04
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1204	<b>4,01</b>	0,44
3	Waktu Penyelesaian	1204	<b>4,01</b>	0,44
4	Biaya/Tarif Pelayanan	1204	<b>4,01</b>	0,44
5	Kesesuaian Produk Layanan	1196	<b>3,98</b>	0,44
6	Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan	1196	<b>3,98</b>	0,44
7	Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan	1203	<b>4,01</b>	0,44
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1204	<b>4,01</b>	0,44
9	Penanganan Pengaduan	1199	3,99	0,44

Dari tabel 10 di atas, terlihat bahwa unsur persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, perilaku pelaksana dalam pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 4,01 , sedangkan

Unsur kesesuaian produk dalam layanan dan kompetensi pelaksana dalam pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.98.

### C. Deskripsi Hasil

#### 1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,40 , tahun 2019 sebesar 3,68 dan tahun 2020 sebesar 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian Persyaratan	3,40	3,68	4,01	4,01

Untuk 2021 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat persyaratan baku disesuaikan peruntukannya.

#### 2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,45 , 2019 sebesar 3,85 dan tahun 2020 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kemudahan Prosedur	3,45	3,85	4,01	4,01

Untuk 2021 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat sesuai SOP.

### 3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,19 , 2019 sebesar 3,85 dan tahun 2020 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei		
	2018	2019	2020
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,19	3,85	4,01

Untuk 2021 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan SOP Pelayanan.

### 4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 3,99 , 2019 sebesar 4,01 dan tahun 2020 sebesar 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kewajaran biaya/tariff Pelayanan	3,99	4,01	4,01	4,01

Untuk 2021 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari ASN.

#### 5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,24 , 2019 sebesar 3,68 dan 2020 sebesar 3,98.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kesesuaian Produk Layanan	3,24	3,68	3,98	3,98

Untuk 2021 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan TUPOKSI Badan.

#### 6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,00 , tahun 2019 sebesar 3,34 dan 2020 sebesar 3,98

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,30	3,34	3,98	3,98

Untuk 2020 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur prilaku petugas sebesar 3,00 , tahun 2019 sebesar 3,68 dan tahun 2020 sebesar 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur prilaku petugas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Nilai Unsur Prilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,00	3,68	4,01	4,01

Untuk 2021 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,40 , tahun 2019 sebesar 4,01 dan tahun 2020 sebesar 4,01

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,40	4,01	4,01	4,01

Untuk 2021 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,28 , tahun 2019 sebesar 3,85 dan tahun 2020 sebesar 3,99

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2021

Unsur	Nilai Survei			
	2018	2019	2020	2021
Penanganan Pengaduan	3,28	3,85	3,99	3,99

Untuk 2021 penanganan pengaduan pelayanan ASN sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di BKPP.

Berdasarkan uraian di atas, maka didapat kesimpulan dan saran sebagai berikut :

**A. Kesimpulan**

Secara umum kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dikategorikan oleh ASN penggunaanya pada posisi **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena angka indek **90** berada pada interval konversi 88,31 - 100,00.

**B. Saran dan Rekomendasi**

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi yaitu :

1. persyaratan pelayanan,
2. sistem, mekanisme dan prosedur,
3. waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan,
4. perilaku pelaksana dalam pelayanan dan
5. kualitas sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah yaitu :

1. Kompetensi Petugas Pelayanan
2. Penanganan pengaduan

Adapun Fasilitas – fasilitas pelayanan yang sudah tersedia diantaranya :

1. Ruang pelayanan satu pintu.
2. Ruang tunggu yang memadai.
3. Petugas pelayanan yang selalu siap melayani ASN dalam menyelesaikan setiap urusan sesuai bidang yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Saran – saran yang dapat diberikan untuk Petugas Pelayanan Satu Pintu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala yaitu siap melayani dan membantu ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

#### **4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala tidak ada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

**Capaian indikator Sasaran 2 Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian didukung oleh :**

1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :

##### **a. Seleksi penerimaan CPNS,**

Capaian kinerja kegiatan seleksi CPNS dengan target 211 orang sesuai dengan surat ketetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Nomer surat : 554

tahun 2021 dengan realisasi 196 orang atau 92,89 % hasil evaluasi sesuai Rekonsiliasi integrasi hasil SKD-SKB CPNS 2021 yang dilaksanakan di Novotel Hotel Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021.

Untuk kegiatan ini pagu sebesar Rp. 468.487.840,00 realisasi sebesar Rp. 443.540.069,00 atau 94,67 %.

Disarankan kepada Panselnas agar formasi yang lowong dapat dioptimalisasikan pada tahun yang sama dengan diisi jabatan lain yang jumlah pelamarnya melebihi jumlah formasi.

#### **b. Penempatan PNS,**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang alih tugas dan pensiun adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani mutasi dan pensiun. Adapun realisasi kinerja selama tahun 2021 adalah :

1. Jumlah PNS Mutasi antar unit kerja 83 orang
2. Jumlah jabatan yang terisi akibat mutasi promosi 270 pada Bulan 18 Mei 2021 sebanyak 1 orang, Tanggal 14 September 2021 sebanyak 112 orang, tanggal 15 November sebanyak 12 orang dan 145 orang pada pelantikan 31 Desember 2021 yang tercantum dalam dalam 12 Surat Rekomendasi Baperjakat dan Pansel JPT Pratama.
3. SK Pensiun BUP 95 orang
4. SK Pensiun APS 3 orang
5. SK pensiun Janda/Duda/Yatim 22 orang

Adapun mengenai realisasi keuangan yang sebesar 98,89% dari Rp. 382.478.600; yaitu Rp. 378.237.400;

Langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya pemenuhan realisasi ini dimasa mendatang adalah dengan cara memastikan pendaftar Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi kuota maksimal dengan cara mempermudah proses pendaftaran melalui penyampaian pengumuman dalam jangka waktu lebih lama ataupun dengan penugasan dari pimpinan Daerah kepada kandidat-kandidat potensial yang memenuhi syarat.

#### **c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang kepangkatan adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani proses kenaikan pangkat. Adapun realisasi kinerja selama tahun 2021 adalah jumlah

Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Naik Pangkat Periode April 2021 dengan jumlah sebanyak 331 orang dan telah mendapat Nota persetujuan dan telah dibuatkan SK sebanyak 311 berkas/orang, sedangkan sebanyak 20 berkas Kenaikan Pangkat TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Naik Pangkat Periode Oktober 2021 dengan jumlah sebanyak 333 berkas/orang dan telah mendapat Nota persetujuan Teknis dan telah dibuatkan SK sebanyak 332 orang, sedangkan sebanyak 1 berkas Kenaikan Pangkat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dengan demikian maka jumlah Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2021 yg telah dibuatkan SK sebanyak 643 orang.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 64.410.000,00 dari pagu sebesar Rp. 68.637.350,00 atau 93,84%.

Salah satu hambatan yang ditemui dalam proses kenaikan pangkat adalah belum seluruh pejabat fungsional memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi, hal ini perlu menjadi perhatian seluruh stakeholder baik SKPD-nya sendiri termasuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk dapat mendorong pejabat-pejabat fungsional mampu dan lulus uji kompetensi tiap jenjang jabatan yang akan diampunya.

#### **d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang dokumentasi dan pengolahan data adalah mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga untuk hosting server aplikasi E-Kinerja dan menyediakan data kepegawaian yang akurat melalui aplikasi SIMPEG dan SAPK BKN yang selalu dilakukan peremajaan/update data ASN. Kegiatan ini dengan target 1500 orang dan telah realisasi sebanyak 1500 orang atau 100%.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 92.153.325,00 dari pagu sebesar Rp. 94.566.200,00 atau 97.45%.

#### **e. Pemberian penghargaan bagi ASN**

Kegiatan yang tercantum dalam Pemberian Penghargaan bagi PNS adalah

- Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala : 1.759 lembar
- Penerbitan surat Cuti : 670 lembar
- Usul Satyalancana Priode Januari 2021 : 71 berkas
- Usul Satyalancana Priode April 2021 : 106 berkas
- Usul Satyalancana Prioder Mei 2021 : 37 berkas

Adapun target fisik pemberian penghargaan bagi PNS sebanyak 403 adalah pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya. Sedangkan yang terealisasi hanya 215 usulan atau 53,35%. Hal ini karena penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS setelah interval masa kerja 10 tahun, yaitu setelah masa kerja 10, 20 dan 30 tahun, sehingga setiap tahun tidak semua PNS dapat diusulkan mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Selain itu beberapa usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Kementerian Dalam Negeri akibat ketidaksesuaian berkas yang dipersyaratkan dengan ketentuan dari Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden, sehingga mengakibatkan target fisik 403 orang yang mendapat Penghargaan, hanya terealisasi sebanyak 215 orang.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 91.700.924,00 dari pagu sebesar Rp. 104.994.800,00 atau 87,34 %.

**f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Rapat Majelis berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan permohonan ijin perceraian, yang menghasilkan rekomendasi pemberian sanksi dan pemberian ijin perceraian terhadap PNS yang bersangkutan.

Adapun hasil dari 12 kali rapat Majelis yang dituangkan dalam 12 rekomendasi memuat :

- Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 6 PNS
- Jumlah PNS yang diberikan izin cerai sebanyak 12 PNS

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 152.765.700,00 dari pagu sebesar Rp. 169.285.790,00 atau 90,24 %.

**g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas**

Kegiatan yang dilaksanakan dibawah sub bidang diklat salah satunya adalah pelayanan administrasi kepegawaian khususnya menangani Pengembangan Kompetensi ASN, yaitu Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas,

untuk kinerja selama tahun 2021 adalah Jumlah ASN Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dengan Pendidikan tidak ada realisasi.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 82.781.200,00 atau 0 %.

#### **h. Pembinaan disiplin ASN/Pelaksanaan sumpah/janji PNS.**

Capaian Kinerja kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 100% dari 140 orang CPNS Formasi 2019 telah disumpah sebanyak 140 orang. Meskipun terjadi pandemic Covid-19 kegiatan pengumpulan massa masih bisa dilakukan dengan protokol kesehatan.

Realisasi keuangan yang hanya sebesar Rp. 10.756.350,00 dari pagu sebesar Rp. 10.940.000,00 atau 98,32 %.

**Keberhasilan capaian Indikator Sasaran 2 Indek kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian disebabkan oleh** berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian semua unsur **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena angka indek **90** berada pada interval konversi 88,31 - 100,00.

Pelayanan administrasi kepegawaian pendukung IKU adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai yang mana masing – masing unsur kegiatan tercapai 100 %.

**Kegagalan capaian Indikator Sasaran 2 Persentase kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian, sebagai berikut :**

1. Masih belum tersedianya petugas khusus pelayanan yang kompeten.

**Srategi kedepan :**

1. Untuk meningkatkan kompetensi petugas agar mengikuti workshop, bimbingan tekhnis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama

**Tabel 3.2.10**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas	Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian	100	95,08	95,08

Dari data penyerapan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang ada pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat adanya efisiensi anggaran dalam pencapaian targetnya.

Sasaran strategis kedua meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil assesmen terdapat tingkat efisiensi 94,94 %.

## 7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah sebagai berikut :

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan :
  - a. Seleksi penerimaan CPNS,
  - b. Penempatan PNS,
  - c. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
  - d. Pembangunan dan pengembangan system informasi Kepegawaian Daerah
  - e. Pemberian Penghargaan terhadap ASN

- f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
- g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dan
- h. Pelaksanaan sumpah/janji PNS.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 7.385.171.003,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.875.263.559,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,10 %.

Komposisi belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun 2021, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.11**  
**Komposisi Belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun Anggaran 2021**  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	4.858.496.169,00	4.447.273.935,00	91,96
2	Belanja Tidak Langsung	2.526.674.834,00	2.427.989.624,00	96,09
<b>Jumlah</b>		<b>7.385.171.003,00</b>	<b>6.875.263.559,00</b>	<b>93,10</b>

*Sumber: Laporan Keuangan tahun 2021*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 91,96 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2021, dan sebesar 96,09 % disumbangkan belanja tidak langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.385.171.003,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.875.263.559,00 atau 93,10 %, dibandingkan dengan tahun 2020 pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.012.727.479,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.142.359.336,00 atau 94,98 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.12**

**Pagu dan Realisasi Anggaran  
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	799.108.200,00	758.712.285,00	94,94
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	830.902.140,00	790.023.699,00	95,08
	<b>Jumlah</b>	<b>1.630.010.340,00</b>	<b>1.548.735.984,00</b>	<b>95.01</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2021.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2.13  
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1	93,10	758.712.285,00	94,94
2	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	95	790.023.699,00	95,08
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>188,10</b>	<b>1.548.735.984,00</b>	<b>95.01</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 terdapat pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dengan

indikator kinerja Indeks kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi kepegawaian terdapat Program Peningkatan disiplin aparatur.

## 1.4 Analisa Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan anantara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) anggaran, (2) realisasi fisik.

KODE REK.					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	%	fisik
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>				
5	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,121,158,223.00</b>	<b>3,001,832,882.00</b>	<b>96.18</b>	98
5	03	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14,979,600.00</b>	<b>14,903,200.00</b>	<b>99.49</b>	100
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,979,600.00	14,903,200.00	99.49	100
5	03	01	2.02		<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,530,549,834.00</b>	<b>2,431,614,624.00</b>	<b>94.82</b>	100
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,526,674,834.00	2,427,989,624.00	96.09	100
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,875,000.00	3,625,000.00	93.55	100
5	03	01	2.06		<b>Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>195,620,765.00</b>	<b>189,790,098.00</b>	<b>92.09</b>	96
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3,279,530.00	3,279,000.00	99.98	100
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,346,455.00	37,760,800.00	98.47	96
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,075,000.00	31,224,000.00	97.35	97

5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,266,180.00	34,877,900.00	96.17	100
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,750,000.00	3,540,000.00	61.57	83
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,903,600.00	79,108,398.00	99.00	100
5	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>167,460,000.00</b>	<b>166,100,000.00</b>	<b>91.56</b>	100
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	6,000,000.00	5,000,000.00	83.33	100
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161,460,000.00	161,100,000.00	99.78	100
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95,218,224.00</b>	<b>89,528,197.00</b>	<b>94.67</b>	96
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,542,500.00	13,740,000.00	94.48	94
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,592,000.00	58,380,197.00	93.27	94
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,083,724.00	17,408,000.00	96.26	100
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117,329,800.00</b>	<b>109,896,763.00</b>	<b>92.63</b>	94
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,600,000.00	54,333,048.00	99.51	100
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,150,000.00	18,161,715.00	72.21	74
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,862,500.00	26,780,000.00	99.69	100
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10,717,300.00	10,622,000.00	99.11	100
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2,098,498,180.00</b>	<b>1,992,276,053.00</b>	<b>94.94</b>	73
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>563,054,040.00</b>	<b>535,693,394.00</b>	<b>96.06</b>	50
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	468,487,840.00	443,540,069.00	94.67	-

5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	94,566,200.00	92,153,325.00	97.45	100
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>451,115,350.00</b>	<b>442,647,400.00</b>	<b>96.37</b>	100
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	382,478,000.00	378,237,400.00	98.89	100
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	68,637,350.00	64,410,000.00	93.84	100
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>799,108,200.00</b>	<b>758,712,285.00</b>	<b>47.47</b>	50
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	0.00	-
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	799,108,200.00	758,712,285.00	94.94	100
5	03	02	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>285,220,590.00</b>	<b>255,222,974.00</b>	<b>91.97</b>	92
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	104,994,800.00	91,700,924.00	87.34	53
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	10,940,000.00	10,756,350.00	98.32	124
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	169,285,790.00	152,765,700.00	90.24	100
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2,165,514,600.00</b>	<b>1,881,154,624.00</b>	<b>86.87</b>	118
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>2,165,514,600.00</b>	<b>1,881,154,624.00</b>	<b>86.87</b>	118
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2,165,514,600.00	1,881,154,624.00	86.87	118
						<b>7,385,171,003.00</b>	<b>6,875,263,559.00</b>	<b>93.10</b>	96

- **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan**

Sisa Anggaran Rp. 509.907.444,00

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran BKPP tahun 2021

Sisa anggaran secara keseluruhan terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja tidak langsung	2.526.674.834,00	2.427.989.624,00	98.685.210,00
2	Belanja langsung	4.858.496.169,00	4.447.273.935,00	411.222.234,00
	Jumlah	7.385.171.003,00	6.875.263.559,00	509.907.444,00

**Realisasi Belanja**

Belanja tidak langsung Rp. 2.427.989.624,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.423.522.498,00	1.366.668.360,00	96,10
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.103.152.336,00	1.061.321.264,00	96,21
	Jumlah	2.526.674.834,00	2.427.989.624,00	96,09

Belanja Langsung Rp. 4.447.273.935,00

**Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 4.281.173.935,00 dengan rincian sebagai berikut :**

KODE REK.					URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,979,600.00	14,903,200.00	99.49
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,875,000.00	3,625,000.00	93.55

5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3,279,530.00	3,279,000.00	99.98
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,346,455.00	37,760,800.00	98.47
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,075,000.00	31,224,000.00	97.35
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,266,180.00	34,877,900.00	96.17
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,750,000.00	3,540,000.00	61.57
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,903,600.00	79,108,398.00	99.00
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,542,500.00	13,740,000.00	94.48
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,592,000.00	58,380,197.00	93.27
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,083,724.00	17,408,000.00	96.26
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,600,000.00	54,333,048.00	99.51
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,150,000.00	18,161,715.00	72.21
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,862,500.00	26,780,000.00	99.69
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	10,717,300.00	10,622,000.00	99.11
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	468,487,840.00	443,540,069.00	94.67
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	94,566,200.00	92,153,325.00	97.45
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	382,478,000.00	378,237,400.00	98.89
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	68,637,350.00	64,410,000.00	93.84

5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	0.00
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	799,108,200.00	758,712,285.00	94.94
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	104,994,800.00	91,700,924.00	87.34
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	10,940,000.00	10,756,350.00	98.32
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	169,285,790.00	152,765,700.00	90.24
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2,165,514,600.00	1,881,154,624.00	86.87
						4,691,036,169.00	4,281,173,935.00	91.26

#### **Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 166.100.000,00**

Merupakan realiasi pengeluaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana lampiran (daftar Belanja Modal Tahun 2021).

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
5.2.3.14.01	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mebeleur</i>			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mebel Lemari	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>			
5.2.3.31.02	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Personal Computer	135.000.000,00	134.640.000,00	99,73

5.2.3.31.03	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Peralatan Personal Computer	23.460.000,00	23.460.000,00	100
5.2.3.31.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan Peralatan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	Jumlah	167.460.000,00	166.100.000,00	99,19

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.2.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran IKU ke 2**  
**Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	1	95	95,08		0,08
	<b>Jumlah</b>	1	95	95,08		0,08

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

## Bab IV Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2021 Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2021** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategi I terdiri dari 1 indikator dengan capaian 94,94 %
2. Sasaran Startegi II terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran diatas 100 % dan yang termasuk dalam Interpretasi sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 Rp. 7.385.171.003,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.875.263.559,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,10 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 509.907.444,00 atau 6,90 %.

Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.630.010.340,00 dengan realisasi sebesar 1.548.735.984,00 atau 95,01 %.

Marabahan, 18 Februari 2021

  
SERALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,  
M. AKHMAD MAWARNI, M.Pd  
NIP. 19640601 198406 1001